The current issue and full text archive of this journal is available on Tarbawi at: https://ejournal.unupasuruan.ac.id/index.php/tarbawi

E-ISSN : 2502-4353, P-ISSN : 2598-4128

Tarbawi
Jurnal Studi Pendidikan Islami

Kiai Pesantren Dalam Politik Pendidikan Islam

Moh. Ismail*
Universitas KH Abdul Chalim Mojokerto

Indonesia
mohismail09@gmail.com

Article Info

Article history:

Diterima: Maret, 2025
Direvisi: Maret, 2025
Diterima: April, 225

Kata kunci:

Kiai pesantren
Politik pendidikan

**** Korespondensi author:***
mohismail09@gmail.com

Abstract

Abstract Purpose: This study aims to map the dynamics of pesantren kiai involvement in Islamic education politics in Bangkalan Regency, examining the patterns of engagement and factors influencing their participation in educational policy formulation.
Design/methodology/approach: Using a qualitative-descriptive approach, data were collected through in-depth interviews, participatory observation, and documentation studies involving kiai, public officials, and community leaders in Bangkalan
Research limitations/implications: The study is limited to Bangkalan Regency and may not be generalizable to other regions. The findings suggest the need for formalized synergy mechanisms between pesantren and local government in education policy-making.
Findings: The relationship between kiai and public officials is mutualistic with patronage characteristics. Kiai involvement is classified into three patterns: active, moderate, and traditional, with dominant influence in socio-cultural domains rather than formal political structures. Factors such as pesantren characteristics, personal charisma of kiai, and local Islamic education issues significantly affect involvement levels.
Originality/value: This research contributes to understanding the strategic role of kiai in Islamic education policy formulation in regional contexts, particularly in areas with strong pesantren traditions, and proposes collaborative frameworks for inclusive education policy development.

Copyright: © 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0).

PENDAHULUAN

Pendidikan Islam di Indonesia memiliki akar sejarah yang sangat kuat, terutama melalui eksistensi pesantren sebagai lembaga pendidikan tertua. Di wilayah seperti Bangkalan, Madura, pesantren tidak hanya berfungsi sebagai pusat pembelajaran agama, tetapi juga sebagai pusat pengaruh sosial, budaya, dan bahkan politik. Dalam konteks ini, kiai—pemimpin tertinggi pesantren—berperan tidak hanya sebagai pendidik, tetapi juga sebagai pengambil kebijakan, pengayom masyarakat, dan pengarah spiritual serta moral.

Transformasi kebijakan pendidikan yang terjadi sejak era reformasi hingga otonomi daerah membuka ruang yang lebih besar bagi aktor lokal, termasuk kiai, untuk terlibat dalam pembentukan dan implementasi kebijakan pendidikan Islam. Hal ini menciptakan dinamika baru, di mana relasi antara pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lokal, termasuk kiai, menjadi penting untuk dikaji. Politik pendidikan tidak lagi dimaknai hanya sebagai aktivitas formal institusi pemerintahan, melainkan mencakup pula interaksi informal yang berlangsung di ruang sosial, budaya, dan religius masyarakat lokal.

Fenomena keterlibatan kiai dalam proses formulasi kebijakan pendidikan di Bangkalan mencerminkan realitas bahwa pendidikan Islam tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial-budaya dan politik lokal. Kiai dengan otoritas spiritual dan kharismanya mampu menjadi opinion leader dan agenda setter dalam banyak keputusan publik, termasuk kebijakan pendidikan. Dalam beberapa kasus, kiai bahkan menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat akar rumput.

Namun demikian, keterlibatan kiai tidak bersifat seragam. Ada kiai yang aktif terlibat dalam forum-forum kebijakan publik, ada yang memilih jalur moderat melalui representasi organisasi, dan ada pula yang mengambil sikap menjaga jarak, fokus pada pengajaran di pesantren. Masing-masing pola keterlibatan ini tentu memiliki implikasi berbeda terhadap kualitas partisipasi publik, efektivitas kebijakan, serta keberlanjutan nilai-nilai Islam dalam sistem pendidikan formal dan nonformal.

Kajian ini menjadi penting untuk menjawab beberapa pertanyaan mendasar: Bagaimana sebenarnya hubungan antara kiai dan aktor-aktor kekuasaan lokal dalam konteks pendidikan? Apakah keterlibatan mereka sekadar simbolik atau memiliki pengaruh substansial? Apa saja faktor yang memengaruhi keterlibatan tersebut? Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, artikel ini diharapkan mampu memberikan pemetaan yang komprehensif tentang dinamika politik pendidikan Islam di Bangkalan, sekaligus memberikan masukan untuk pembentukan kebijakan pendidikan yang lebih inklusif dan kontekstual.

Tinjauan Pustaka

2.1 Konsep Kiai dan Pesantren

Kiai dalam tradisi Islam Indonesia bukan sekadar tokoh agama, tetapi juga simbol budaya, pemimpin sosial, bahkan aktor politik. Horikoshi (1976) menyebutkan bahwa kiai adalah figur sentral dalam pesantren yang memainkan peran ganda sebagai pendidik, pemimpin moral, dan penjaga tradisi. Menurut Dhofier (2011), kiai adalah pemegang otoritas tertinggi dalam pesantren yang dihormati karena ilmunya dan integritas pribadinya. Gelar "kiai" sendiri dalam konteks Jawa mengandung makna orang suci atau orang yang dihormati.

Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional memiliki struktur sosial yang khas, di mana hubungan antara santri dan kiai tidak hanya berbasis pada relasi pedagogik, tetapi juga spiritual. Pesantren biasanya tumbuh bersama masyarakat, dan dalam banyak kasus kiai berperan sebagai penengah konflik sosial, pemimpin komunitas, dan rujukan dalam berbagai keputusan penting, termasuk kebijakan lokal.

2.2 Politik Pendidikan Islam

Politik pendidikan mengacu pada proses, strategi, dan pertarungan kepentingan yang terjadi dalam perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan pendidikan. Dalam konteks Islam, politik pendidikan tidak hanya berkaitan dengan materi pelajaran, tetapi juga ideologi, identitas, dan orientasi nilai yang ingin ditanamkan kepada peserta didik. Menurut Mahfud (2013), politik pendidikan Islam di Indonesia dipengaruhi oleh tarik menarik antara kepentingan negara, agama, dan masyarakat sipil.

Pendekatan politik terhadap pendidikan Islam menekankan pada bagaimana kekuasaan digunakan untuk menentukan isi kurikulum, siapa yang berhak mengajar, bagaimana sistem sertifikasi ditentukan, serta siapa yang berhak mengakses pendidikan keagamaan. Dalam

praktiknya, interaksi antara aktor-aktor pendidikan—termasuk kiai, birokrat, legislatif, dan ormas—menentukan arah dan bentuk kebijakan pendidikan Islam.

2.3 Studi Terdahulu

Turmudi (2003) dalam studinya "Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan" mengungkap bahwa kiai dapat menjadi bagian dari politik praktis dalam rangka memperjuangkan kepentingan umat atau pesantren. Sementara itu, Saerozi (2003) menelusuri jejak historis keterlibatan kiai dalam penentuan arah pendidikan agama di Indonesia. Thoha (2013) menambahkan bahwa meskipun pendidikan dan politik memiliki nilai dan ruang berbeda, keduanya saling memengaruhi secara signifikan.

Kajian yang lebih kontekstual dilakukan oleh Mukhlishi (2016) mengenai hubungan antara elite pesantren dan pengambil kebijakan pendidikan di Sumenep. Ia mengidentifikasi tiga bentuk keterlibatan kiai: sebagai pengambil kebijakan langsung, sebagai aktor pengaruh, dan sebagai oposisi kultural. Kajian ini menjadi inspirasi penting untuk mengeksplorasi lebih lanjut konteks di Bangkalan yang memiliki karakteristik sosial dan budaya yang berbeda.

Dari berbagai studi tersebut, tampak bahwa peran kiai dalam politik pendidikan tidak bisa diseragamkan. Perbedaan latar belakang pesantren, karakter personal kiai, serta dinamika politik lokal sangat menentukan bagaimana seorang kiai terlibat dalam urusan kebijakan pendidikan. Oleh karena itu, pemetaan terhadap konteks spesifik seperti di Bangkalan menjadi krusial untuk memperkaya khazanah literatur tentang hubungan antara agama dan politik pendidikan di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menggambarkan realitas sosial-politik secara mendalam dan kontekstual, khususnya yang berkaitan dengan keterlibatan kiai dalam ranah politik pendidikan Islam di Bangkalan (Sugiyono, 2022). Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengungkap makna, pemahaman, dan persepsi dari para informan terhadap suatu fenomena yang kompleks dan dinamis.

Lokasi penelitian dipusatkan di Kabupaten Bangkalan, Madura, yang dikenal sebagai salah satu wilayah dengan konsentrasi pesantren tertinggi di Jawa Timur. Penentuan lokasi didasarkan atas pertimbangan karakteristik sosial budaya masyarakat yang masih kuat dipengaruhi oleh pesantren dan figur kiai. Subjek penelitian terdiri dari para kiai pengasuh pesantren, pejabat publik yang terlibat dalam kebijakan pendidikan, tokoh masyarakat, serta aktor-aktor dari organisasi masyarakat Islam lokal. Subjek dipilih secara purposive dengan kriteria: memiliki otoritas atau keterlibatan dalam kebijakan pendidikan, serta mewakili spektrum keterlibatan (aktif, moderat, dan tradisional).

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama: wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi (Bungin, 2020). Wawancara mendalam dilakukan terhadap kiai, pejabat pemerintah daerah (terutama dari Dinas Pendidikan dan Bappeda), serta perwakilan dari organisasi masyarakat Islam. Wawancara bersifat semi-terstruktur untuk memberikan ruang bagi eksplorasi naratif dari informan. Observasi partisipatif dilakukan dalam berbagai kegiatan formal dan informal seperti forum Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang), rapat-rapat pendidikan, kegiatan pesantren, dan forum keagamaan. Observasi ini memungkinkan peneliti mengamati secara langsung dinamika relasi sosial-politik yang terjadi. Studi dokumentasi mencakup pengumpulan data dari dokumen kebijakan, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, notulensi rapat, dan berita media lokal yang relevan.

Analisis data dilakukan sejak proses pengumpulan data dimulai dan berlangsung secara simultan menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (Arikunto, 2013). Reduksi data dilakukan dengan menyortir, memilih, dan merangkum informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Penyajian data disusun dalam bentuk matriks, narasi tematik, dan kutipan langsung dari informan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan mengkaji pola, hubungan antar data, serta triangulasi antara sumber data dan metode. Selain itu, pendekatan analisis kebijakan publik yang dikembangkan William N. Dunn (2018) juga digunakan untuk memahami dinamika peran kiai dalam proses kebijakan pendidikan, baik dalam tahap formulasi maupun implementasi.

Keabsahan data dijaga melalui empat kriteria validitas dalam penelitian kualitatif: kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Kredibilitas dijaga melalui triangulasi sumber dan metode, serta teknik member check dengan mengonfirmasi hasil wawancara kepada informan. Transferabilitas dipastikan melalui deskripsi kontekstual yang mendalam tentang latar penelitian. Dependabilitas dicapai dengan menyusun catatan lapangan dan prosedur penelitian secara sistematis. Konfirmabilitas diperoleh dengan menjaga objektivitas peneliti dan transparansi proses analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Relasi Kekuasaan Kiai dan Pejabat Publik

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kiai di Bangkalan memegang posisi yang sangat strategis dalam struktur sosial masyarakat. Relasi antara kiai dan pejabat publik didasarkan pada pola simbiosis mutualisme. Kiai memberikan legitimasi moral dan sosial kepada pejabat, sedangkan pejabat memberikan dukungan fasilitas dan akses kebijakan kepada pesantren. Relasi ini bersifat patronase dalam arti pejabat menggantungkan dukungan sosial-politiknya pada kiai, khususnya saat proses politik seperti pemilihan kepala daerah.

Dalam beberapa wawancara, terungkap bahwa kiai sering kali dimintai restu sebelum seorang calon kepala daerah mendeklarasikan pencalonannya. Restu tersebut dianggap mampu memberikan efek domino terhadap sikap politik warga pesantren dan masyarakat di sekitarnya. Misalnya, dalam Pemilihan Bupati Bangkalan, banyak calon kepala daerah secara informal meminta dukungan simbolik dari para kiai kharismatik yang memiliki pesantren besar. Temuan ini sejalan dengan pandangan Dhofier (2011) yang menyebutkan bahwa kiai adalah pemegang otoritas tertinggi dalam pesantren yang dihormati karena ilmunya dan integritas pribadinya.

Namun demikian, relasi ini tidak sepenuhnya transaksional. Banyak kiai menempatkan peran mereka lebih kepada pengayoman masyarakat daripada sekadar alat kekuasaan. Kiai senior lebih selektif dalam memberikan dukungan politik, dan sering kali menetapkan prasyarat moral dan keumatan kepada calon yang didukung. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat relasi patronase, kiai tetap mempertahankan independensi moral dan spiritual mereka sebagai pemimpin keagamaan.

Pola Keterlibatan Kiai dalam Politik Pendidikan Islam

Penelitian ini mengidentifikasi tiga pola keterlibatan kiai dalam politik pendidikan Islam di Bangkalan, yaitu kiai aktif, kiai moderat, dan kiai tradisional. Klasifikasi ini didasarkan pada intensitas dan cara keterlibatan mereka dalam proses kebijakan pendidikan.

Kiai Aktif

Kiai dalam kelompok ini terlibat langsung dalam perumusan kebijakan publik. Mereka hadir dalam forum Musrenbang, FGD Dinas Pendidikan, dan ikut memberikan rekomendasi dalam penyusunan Peraturan Daerah terkait pendidikan keagamaan. Beberapa kiai aktif menjadi anggota dewan pendidikan daerah atau menjadi penasihat informal pejabat eksekutif di kabupaten. Contoh kiai aktif adalah mereka yang membuka pesantren modern dengan kurikulum terpadu antara ilmu agama dan sains, serta menjalin kemitraan dengan instansi pemerintah. Mereka juga memfasilitasi dialog antar aktor pendidikan di tingkat kabupaten.

Keterlibatan aktif ini mencerminkan transformasi peran kiai dari sekadar tokoh keagamaan menjadi aktor politik pendidikan yang strategis. Mereka tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga subjek yang aktif membentuk arah kebijakan pendidikan Islam di daerahnya. Pola ini sejalan dengan temuan Mukhlishi (2016) yang mengidentifikasi kiai sebagai pengambil kebijakan langsung dalam konteks Sumenep.

Kiai Moderat

Kiai moderat tidak hadir secara langsung dalam forum formal kebijakan, namun pengaruhnya tetap signifikan melalui perwakilan organisasi, jaringan alumni, atau forum keagamaan. Mereka memanfaatkan struktur kelembagaan seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), atau Forum Komunikasi Pondok Pesantren untuk menyampaikan aspirasi dan kritik terhadap kebijakan pendidikan.

Peran kiai moderat ini juga tampak dalam pernyataan resmi, surat terbuka, atau pengajian umum yang sering dijadikan saluran penyampaian aspirasi masyarakat pesantren. Meski secara fisik tidak hadir dalam proses perumusan kebijakan, kiai moderat memiliki kemampuan mempengaruhi arah kebijakan melalui opini publik. Strategi ini menunjukkan bahwa pengaruh kiai tidak selalu memerlukan kehadiran formal dalam struktur birokrasi, tetapi dapat dijalankan melalui jejaring sosial dan organisasi yang kuat.

Kiai Tradisional

Kelompok ini cenderung menjauh dari urusan formal pemerintahan dan lebih fokus pada pengajaran kitab kuning dan pendidikan moral. Namun demikian, kiai tradisional tetap memiliki kekuatan simbolik yang besar. Sikap dan pandangan mereka terhadap isu pendidikan sangat mempengaruhi masyarakat pesantren. Kiai tradisional jarang berinteraksi langsung dengan pemerintah, namun pandangan mereka tetap diakomodasi secara tidak langsung. Hal ini terlihat ketika pemerintah mengadopsi kurikulum pesantren dalam regulasi formal atau menyediakan ruang khusus bagi pesantren tradisional dalam sistem pendidikan nasional.

Meskipun tampak pasif, kiai tradisional memiliki pengaruh yang substansial dalam membentuk orientasi nilai pendidikan Islam di tingkat akar rumput. Legitimasi mereka bersumber dari otoritas keagamaan yang diakui secara luas oleh masyarakat pesantren. Hal ini sejalan dengan konsep Horikoshi (1987) tentang kiai sebagai figur sentral yang memainkan peran ganda sebagai pendidik, pemimpin moral, dan penjaga tradisi.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keterlibatan Kiai

Pola keterlibatan kiai dalam politik pendidikan Islam dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Pertama, karakteristik pesantren yang dipimpin sangat menentukan orientasi keterlibatan kiai. Pesantren modern dengan sistem pendidikan terpadu cenderung lebih terbuka

terhadap kolaborasi dengan pemerintah, sementara pesantren salafiyah lebih mempertahankan independensi dan fokus pada pengajaran tradisional.

Kedua, kharisma personal dan jejaring sosial-politik yang dimiliki kiai turut memengaruhi tingkat pengaruh mereka dalam kebijakan pendidikan. Kiai dengan jejaring luas dan pengakuan publik yang kuat memiliki daya tawar lebih tinggi dalam berinteraksi dengan pejabat publik. Ketiga, isu-isu strategis dalam pendidikan Islam lokal seperti sertifikasi guru, alokasi anggaran pendidikan keagamaan, dan pengakuan ijazah pesantren menjadi faktor pendorong keterlibatan kiai dalam arena politik pendidikan.

Temuan ini menunjukkan bahwa politik pendidikan Islam di Bangkalan tidak dapat dipahami secara terpisah dari dinamika sosial, budaya, dan religius masyarakat setempat. Kiai sebagai aktor kultural memiliki peran yang tidak kalah penting dibandingkan aktor formal dalam sistem birokrasi pemerintahan. Hal ini memperkuat argumentasi Mahfud (2013) bahwa politik pendidikan Islam di Indonesia dipengaruhi oleh tarik menarik antara kepentingan negara, agama, dan masyarakat sipil.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa keterlibatan kiai pesantren dalam politik pendidikan Islam di Bangkalan berlangsung dalam relasi yang kompleks antara kekuasaan formal dan kekuatan kultural. Kiai memainkan peran sebagai aktor strategis dalam membentuk arah kebijakan pendidikan, baik melalui jalur formal maupun informal. Relasi antara kiai dan pejabat publik bersifat mutualistik dan patronase, di mana kiai menjadi sumber legitimasi sosial sementara pejabat memberikan dukungan politik dan administratif.

Keterlibatan kiai terbagi dalam tiga pola utama: aktif, moderat, dan tradisional. Kiai aktif terlibat langsung dalam forum kebijakan, kiai moderat menyampaikan aspirasi melalui saluran organisasi, sementara kiai tradisional tetap berpengaruh melalui otoritas moral dan budaya. Pola keterlibatan ini dipengaruhi oleh karakteristik pesantren, profil personal kiai, serta isu-isu strategis dalam pendidikan Islam lokal. Pengaruh kiai lebih kuat dalam tataran sosial-budaya dibandingkan struktur birokrasi formal. Suara mereka sering kali menjadi penentu dalam keputusan-keputusan pendidikan yang sensitif, meskipun secara struktural mereka belum mendapatkan tempat yang permanen dalam sistem pemerintahan.

Temuan ini membawa implikasi penting bagi pengembangan kebijakan pendidikan Islam yang lebih kontekstual dan partisipatif. Pemerintah daerah perlu merancang mekanisme yang memungkinkan partisipasi kiai dalam setiap tahap siklus kebijakan, dari perencanaan hingga evaluasi. Hal ini bisa difasilitasi melalui pembentukan forum kemitraan strategis yang melibatkan unsur pemerintah, pesantren, dan masyarakat sipil. Diperlukan pula penguatan kapasitas pesantren dalam advokasi kebijakan melalui pelatihan, pendampingan hukum, serta pembangunan pusat kajian kebijakan berbasis pesantren. Kiai juga perlu didorong untuk memperkuat jejaring dan kolaborasi lintas pesantren guna memperbesar daya tawar kolektif dalam arena politik pendidikan.

Secara jangka panjang, kolaborasi ini diharapkan mampu mendorong lahirnya kebijakan pendidikan Islam yang tidak hanya responsif terhadap nilai-nilai lokal, tetapi juga inklusif terhadap perkembangan sosial dan tantangan global. Politik pendidikan Islam seharusnya tidak hanya menjadi wilayah elite birokrasi, tetapi ruang partisipatif yang melibatkan aktor-aktor kultural yang memiliki kedekatan dengan realitas masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Alatas, S. H. (2018). Pesantren dan transformasi sosial: Kontestasi nilai dalam pendidikan Islam. Islamika, 20(2), 99-122.

Anderson, J. E. (2015). Public policymaking: An introduction (8th ed.). Cengage Learning.

Arikunto, S. (2013). Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik. Rineka Cipta.

Azra, A. (2021). Pendidikan Islam: Tradisi dan modernisasi menuju milenium baru. Kencana.

Bungin, B. (2020). Metodologi penelitian kualitatif. Kencana.

Dhofier, Z. (2011). Tradisi pesantren: Studi tentang pandangan hidup kiai dan visinya mengenai masa depan Indonesia. LP3ES.

Dunn, W. N. (2018). Pengantar analisis kebijakan publik. Gadjah Mada University Press.

Fakih, M. (2015). Analisis sosial untuk pemberdayaan. LKiS.

Faridl, M. (2019). Peran sosial politik kiai di Indonesia. Jurnal Sosioteknologi, 18(2), 155-170.

Haryatmoko. (2016). Etika politik dan kekuasaan. Penerbit Kanisius.

Horikoshi, H. (1987). Kiai dan perubahan sosial. P3M.

Kementerian Agama RI. (2019). Statistik pendidikan Islam tahun 2018/2019. Kemenag.

Mahfud, C. (2013). Politik pendidikan Islam di Indonesia [Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel]. Repository UIN Sunan Ampel Surabaya.

Maimun, A. (2023). Relevansi peran kiai dalam formulasi kebijakan pendidikan keagamaan. Jurnal Pendidikan Agama Islam, 15(1), 55-70.

Maschan Ali. (2017). Nasionalisme kiai: Konstruksi sosial berbasis agama. LKiS.

Mukhlishi. (2016). Pesantren dan politik pendidikan: Relasi elite pesantren dengan pemangku kebijakan pendidikan di Sumenep. UIN Sunan Ampel.

Nasir, R. (2015). Mencari tipologi format pendidikan ideal. Pustaka Pelajar.

Nurkholis, H. (2022). Islamic boarding schools and local political dynamics. Jurnal Sosial Politik, 11(3), 201-220.

Raharjo, M. (2020). Pemikiran kebijakan pendidikan kontemporer. UIN Maliki Press.

Rosyada, D. (2020). Paradigma pendidikan demokratis: Sebuah model pelibatan masyarakat dalam pendidikan. Kencana.

Saerozi, M. (2015). Politik pendidikan agama dalam era pluralisme [Doctoral dissertation, UIN Sunan Kalijaga]. Repository UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Sirozi, M. (2017). Politik pendidikan: Dinamika hubungan antara kepentingan kekuasaan dan praktik penyelenggaraan pendidikan. Rajawali Press.

Sugiyono. (2022). Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.

Suprayogo, I. (2018). Kiai dan politik: Membaca citra politik kiai Malang. UIN Press.

Turmudi, E. (2014). Perselingkuhan kiai dan kekuasaan. LKiS.

Wahid, A. (2021). Cultural capital of pesantren leaders in local government policies. Studia Islamika, 28(2), 213-240.

Yasmadi. (2012). Modernisasi pesantren. Ciputat Press.

Zarkasyi, H. F. (2019). The integration of Islamic education and national curriculum in Indonesia. Tafsir: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, 7(1), 1-16.

Zuhairini, Z. (2020). Pendidikan Islam. Bumi Aksara.

Zuhdi, M. (2019). The politics of Islamic education in Indonesia: A historical perspective. Journal of Indonesian Islam, 13(1), 1-15.